

Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrim Melalui Sinergi Pemberdayaan Masyarakat

M. Elfan Kaukab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia
elfan@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah memotret pola-pola penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam rangka mengentaskan kemiskinan ekstri dengan menggandeng masyarakat untuk bersinergi dalam mencapai tujuan.

Metode – Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deksriptif. Sementara desain yang digunakan dalam penulisan ini adalah desain library studies di mana penulis melakukan penelusuran terhadap literature kemudian melakukan penelaahan.

Hasil – Sinergitas strategi penanggulangan kemiskinan selama ini telah dirumuskan menjadi lima kategori, yaitu: (1) Aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan; (2) Kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan; (3) Sumber daya manusia (4) Data dan informasi mengenai kemiskinan, dan (5) Sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Implikasi – Sebagai bentuk pemetaan sinergi pengentasan kemiskinan dengan pola-pola yang melibatkan masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan dengan terstruktur dan sistematis.

Kata Kunci: penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrim, pemberdayaan masyarakat

Latar Belakang

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing (Novrizaldi, 2021). Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan daya saing daerah.

Untuk memangkas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya terpadu untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Penguatan ekonomi keluarga memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan supaya implementasi program dapat dilakukan tepat sasaran. Sehingga, target penguatan ekonomi keluarga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dapat dilakukan sesuai harapan. Penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian dari upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, karena kemiskinan ekstrem sarannya adalah keluarga atau rumah tangga miskin. Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan pembinaan ketahanan

dan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi.

UU tersebut juga mengamankan peningkatan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan inovatif dalam memberikan bantuan bagi keluarga miskin, serta penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh sejumlah kementerian atau lembaga sudah cukup memadai. Contohnya adalah program pengurangan beban, program peningkatan pendapatan, dan program yang menyasar kantong-kantong kemiskinan. Intervensi kepada keluarga miskin juga sudah dilakukan melalui perlindungan sosial yang meliputi pemberian bantuan dan jaminan sosial. Namun, bantuan dan jaminan sosial dinilai belum cukup (Kompas, 2023). Perlu ada graduasi untuk masuk pada tingkat ekonomi yang lebih tinggi melalui upaya pemberdayaan. Untuk itu, efektivitas kolaborasi dalam melaksanakan berbagai program yang dijalankan perlu dilakukan dengan memastikan ketepatan sasaran berdasarkan basis data kemiskinan yang terpadu.

Mewujudkan target penurunan penduduk miskin ekstrem bukanlah perkara mudah. Selain dibutuhkan validasi dan pemutakhiran data keluarga miskin ekstrim untuk mencegah intervensi program tidak salah sasaran, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu memilih program penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif. Kondisi kemiskinan ekstrim itu sendiri adalah kemiskinan yang mengikuti standar global yang dibuat oleh Bank Dunia. Menggunakan estimasi konsumsi atau keseimbangan kemampuan berbelanja yang dikonversi ke dalam dolar AS Purchasing Power Parity (PPP), Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional, yakni 1,90 dolar AS PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 dolar AS PPP sebagai batas poverty. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga satu dolar AS. Pada 2021 diperkirakan 1,90 dolar AS PPP setara dengan Rp 11.941,10. Hal tersebut berdasarkan estimasi konversi dolar AS PPP pada 2017 yang digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Maret 2017 - Maret 2021. Pada 2017 sebesar 1,90 dolar AS PPP setara dengan Rp 10.195,60 (berdasarkan data terakhir Bank Dunia).

Selain itu, ciri penduduk miskin ekstrim biasanya tak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan tidak memiliki tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga. Chambers (1987) dalam Suyanto (2020) menyebut ciri utama penduduk miskin ekstrem adalah rentan atau rapuh. Tidak dimilikinya tabungan yang cukup dan tanggungan utang relatif besar adalah kombinasi tekanan sosial yang menyebabkan penduduk miskin masuk dalam perangkat kemiskinan yang makin lama makin tidak memungkinkan mereka untuk keluar secara mandiri (Kaukab, 2022)

Permasalahan sosial ekonomi sangat kompleks. Pemerintah baik ditingkat nasional sampai daerah harus ikut andil besar untuk segera melakukan terobosan penguatan perekonomian untuk mempercepat stabilitas dengan program-program dan kebijakan yang mengarah pada pemulihan ekonomi. Ditingkat paling bawah yaitu masyarakat dengan kemiskinan ekstrim mengalami keterpurukan kemampuan daya beli yang sangat tajam. Hal ini tentu membutuhkan campur tangan yang serius dari pemerintah agar kondisi ini tidak semakin memperburuk kehidupan baik sosial maupun ekonomi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deksriptif. Sementara desain yang digunakan dalam penulisan ini adalah desain library studies di mana penulis melakukan penelusuran terhadap literature kemudian melakukan penelaahan. Penelitian ini secara kasar digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Amatan yang dilakukan yaitu terkait pola penguatan perekonomian masyarakat Kabupaten Wonosobo yang masuk dalam kategori masyarakat dengan kemiskinan ekstrim.

Pembahasan

1. Tingkat Kemiskinan di Wonosobo

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian utama. Hal ini terbukti dengan penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Permasalahan kemiskinan mendapat perhatian yang besar karena disadari bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang erat kaitannya dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain. Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu agenda utama yang harus diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dimulai sejak era orde baru hingga saat ini. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan sudah dijalankan pemerintah Indonesia, dari level pemerintah pusat hingga level pemerintah daerah.

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu masalah besar. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun dirasa masih belum optimal. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan tepat sasaran adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya. Pengukuran yang dipercaya dapat menjadi elemen penting dalam pengambilan kebijakan terhadap kondisi hidup orang miskin. Dalam menentukan suatu wilayah desa tergolong miskin atau tidak, analisis yang digunakan biasanya masih bersifat global, artinya diberlakukan untuk semua lokasi yang diamati. Sementara kenyataannya kondisi lokasi yang satu tidak selalu sama dengan kondisi yang lain, karena kondisi kemiskinan suatu desa sangat mungkin dipengaruhi oleh lokasi pengamatan atau kondisi geografis (spatial variation) desa, termasuk posisinya terhadap desa lain di sekitarnya sehingga model penentuan tingkat kemiskinan yang bersifat global tidaklah cocok digunakan karena munculnya heterogenitas spasial.

Permasalahan kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selama 10 tahun terakhir, isu kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan mendapatkan perhatian yang besar bahkan mendapatkan prioritas pertama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah (Renstra Kab.Wonosobo). Selama lebih dari 5 tahun terakhir, Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat tiga besar kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak se-Jawa Tengah, bahkan tidak jarang tertinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah.

Gambar 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo 2018-2023 (BPS, 2023)**Angka Kemiskinan 2018-2020**

◀ back 

Data series subyek **Kemiskinan** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : [2021-2023](#) **[2018-2020](#)** [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [1996-2002](#)

Search:

Wilayah (Kab.Wonosobo)	Angka Kemiskinan								
	Batas Kemiskinan (Rp/Kal/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (000 org)			Persentase Penduduk Miskin		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kabupaten Wonosobo	323 490,00	340 827,00	362 683,00	138,30	131,30	137,64	17,58	16,63	17,36

Showing 1 to 1 of 1 entries

Data Series : [2021-2023](#) **[2018-2020](#)** [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [1996-2002](#)

Search:

Angka Kemiskinan 2021-2023

◀ back 

Data series subyek **Kemiskinan** juga dapat diakses melalui **Fitur Tabel Dinamis**.

Data Series : [2021-2023](#) [2018-2020](#) [2015-2017](#) [2012-2014](#) [2009-2011](#) [2006-2008](#) [2003-2005](#) [1996-2002](#)

Search:

Wilayah (Kab.Wonosobo)	Angka Kemiskinan								
	Batas Kemiskinan (Rp/Kal/Bulan)			Jumlah Penduduk Miskin (000 org)			Persentase Penduduk Miskin		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten Wonosobo	373 474,00	399 180,00	425 105,00	139,67	128,11	123,70	17,67	16,17	15,58

Showing 1 to 1 of 1 entries

Selama 5 tahun terakhir, jumlah dan persentase penduduk miskin Wonosobo cenderung mengalami penurunan walaupun antar tahunnya berfluktuasi. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 adalah sebesar 17,58 persen, kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 16,63 persen. Pada tahun 2020, penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 17,36 persen, sedikit mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 17,67 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 16,17 persen. Secara umum, selama kurun waktu tersebut, terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Kenaikan kemiskinan pada tahun 2020 diakibatkan sebagai efek dari pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Wonosobo. Efek dari pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Efek pandemi covid-19 dapat dilihat dari survei yang dilakukan BPS pada bulan April 2020 yang menghasilkan publikasi “Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam Era New normal”. Contoh efek pandemi, sebanyak 69,44 persen responden menyatakan selalu menghindari penggunaan transportasi umum selama pandemi sedangkan 11,68 persen kadang-kadang menghindari transportasi umum, artinya terjadi penurunan aktivitas ekonomi di bidang transportasi yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan orang yang bekerja di bidang transportasi. Dari responden yang mengisi survei, tercatat 11,06 persen mengalami PKH akibat perusahaan/tempat usaha dimana ia bekerja ditutup sementara bahkan permanen, sedangkan 27,43 persen

bekerja namun sementara dirumahkan. Beberapa contoh pengurangan aktivitas ekonomi tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada berkurangnya konsumsi rumah tangga (BPS, 2023). Jika kita bandingkan angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah, terdapat perbedaan yang cukup jauh. Pada tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo adalah 15,58 persen sedangkan Jawa Tengah 10,77 persen, terjadi selisih 4,81 persen.

Garis Kemiskinan (GK) adalah garis yang menunjukkan nilai minimal dari suatu rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak masuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Seseorang dalam suatu rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan masuk dalam kelompok penduduk miskin. Selama 5 tahun terakhir, yaitu 2019–2023, garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan fluktuatif tiap tahunnya. Artinya agar tidak masuk dalam kategori penduduk miskin, maka konsumsi masyarakat di Kabupaten Wonosobo, secara nominal harus terus ditingkatkan. Kenaikan GK disebabkan salah satunya oleh inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan GK naik sehingga orang akan membutuhkan “pengeluaran” lebih jika ingin keluar dari kategori miskin. Itulah kenapa, sebisa mungkin inflasi perlu dikendalikan, bukan diminimalkan, pada level tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi dan diluar batas kendali berpeluang meningkatkan jumlah penduduk miskin (BPS, 2023).

Data yang diterbitkan oleh BPS (2023) yaitu Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam angka menggambarkan beberapa kondisi masyarakat Kabupaten Wonosobo yang dapat digunakan sebagai pijakan penentuan pola penguatan perekonomian.

1. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 15,58 persen, menurun 0,59 persen terhadap persentase penduduk miskin tahun 2022.
2. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 123,70 ribu orang, menurun 4,41 ribu orang terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2022.
3. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 2,60 persen, menurun 0,58 poin terhadap indeks kedalaman kemiskinan tahun 2022.
4. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 0,63 persen, menurun 0,23 poin terhadap indeks keparahan kemiskinan tahun 2022.
5. Garis kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 425.105,-/kapita/bulan meningkat dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2022 sebesar Rp 399.180,-/kapita/bulan.

Gambar 2. Peta Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Wonosobo



2. Pola Penguatan Ekonomi

Strategi penanggulangan kemiskinan selain diupayakan oleh pemerintah pusat juga diupayakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Dengan adanya krisis ekonomi dan proses transisi dari sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik ke arah otonomi daerah, maka pemda menghadapi tantangan baru untuk menggerakkan pembangunan maupun menanggulangi kemiskinan. Oleh sebab itu, langkah strategis yang harus dilakukan harus dilakukan secara bertahap (Sopandi, 2021), yaitu:

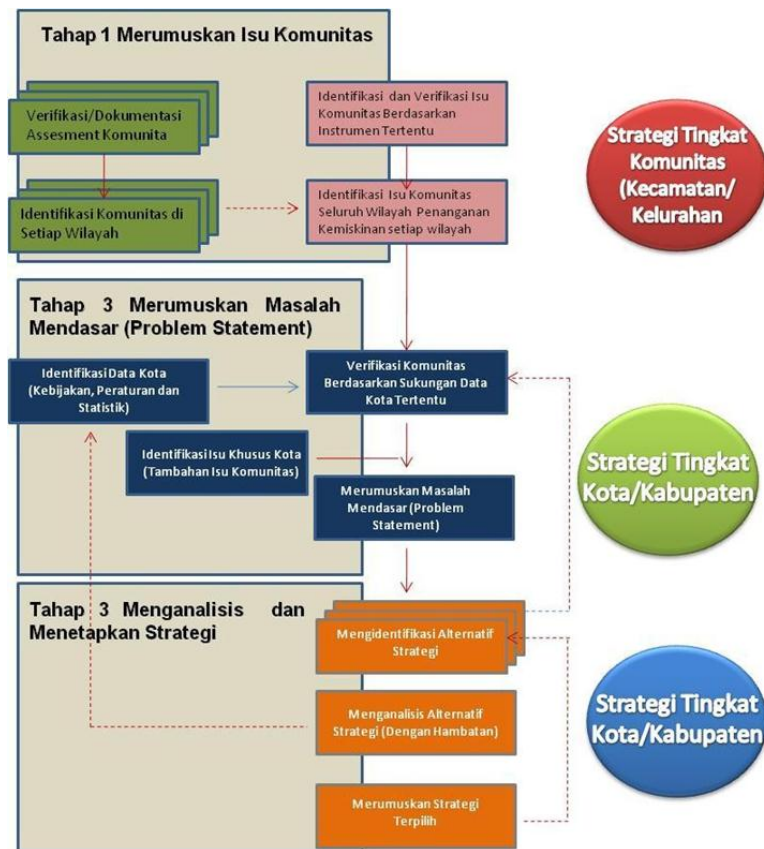
1. Mengidentifikasi isu komunitas (baik tingkat Kota/ Kecamatan/ Kelurahan /Masyarakat)
2. Merumuskan Masalah yang Mendasar
3. Kemampuan Menganalisis dan Menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun kelurahan

Ketiga hal tersebut harus dilakukan secara sinergis dalam upaya penanganan kemiskinan di masyarakat, optimalisasi sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, meliputi:

1. Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, duniausaha, masyarakat madani) perlu dioptimal lagi;
2. Pendataan, pendanaan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan lagi;
3. Koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah perlu di optimalkan lagi;
4. Kemitraan dan kerjasama antara kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan belum optimal

Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, adalah dengan Meningkatkan Peran Pemerintahan Daerah untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (*pro-poor, pro-jobs, dan pro-growth*), melalui;

1. Kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui penetapan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
2. Alokasi APBD yang berpihak pada masyarakat miskin dengan meningkatkan porsi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dan kegiatan padat karya bagi masyarakat miskin;
3. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin khususnya kaum perempuan terhadap sumber daya kapital; dana bergulir dan kredit mikro;
4. Membentuk dan atau memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TLPK) Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Gambar 3. Kerangka Kerja Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara, guna mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 akan fokus pada “Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah”.

Pada 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan tidak ada lagi warganya yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem. Strateginya, konsistensi pelaksanaan berbagai upaya percepatan penanganan dan intervensi berbasis optimalisasi potensi daerah dan perbaikan data. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah optimalisasi pengelolaan potensi daerah antara lain pertanian hortikultura, dombos, durian, carica, dan purwaceng. Selain itu, pemanfaatan potensi dari destinasi wisata yang masih dapat ditingkatkan (jatengprov.go.id).

3. Sinergitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Saat ini pemerintah sedang merumuskan dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Dalam rangka pengarusutamaan kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah menyiapkan pedoman dan petunjuk bagi instansi sektoral dan daerah untuk menyusun program dan rencana anggaran pembangunan yang berpihak pada upaya penanggulangan kemiskinan serta memberikan bantuan teknis kepada instansi sektoral dan daerah untuk melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terdesentralisasi.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di daerah dan adanya umpan balik (*feedback*) terhadap strategi jangka panjang yang dirumuskan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka daerah-daerah. Berbagai masukan yang terkait dengan pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. Masukan-masukan ini menyangkut aspek sinergitas, seperti aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, ketersediaan sumber daya manusia, penyediaan data dan informasi, serta monev. Selain itu, juga ada masukan mengenai peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga donor, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan dorongan atau support untuk melakukan sinergitas strategi penanggulangan kemiskinan di daerah.

Sinergitas strategi penanggulangan kemiskinan selama ini telah dirumuskan menjadi lima kategori, yaitu: (1) Aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan; (2) Kebijakan dan penganggaran program untuk penanggulangan kemiskinan; (3) Sumber daya manusia (4) Data dan informasi mengenai kemiskinan, dan (5) Sistem monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Alternatif pemecahan terhadap kelima masalah tersebut dijelaskan sebagai berikut (Sopandi, 2021):

1) Aspek koordinasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan

Pada aspek kelembagaan diperlukan lembaga seperti Lembaga Penanggulangan Kemiskinan (LPK) yang kuat, melalui penguatan kapasitas LPK, keanggotaan LPK yang multi-stakeholders, adanya legalitas LPK yang berkelanjutan dengan tugas-tugas yang secara jelas dirumuskan dalam suatu peraturan daerah (perda), dan penguatan kapasitas bagi masyarakat dan lembaga masyarakat, baik yang sifatnya formal maupun nonformal. Lembaga LPK yang kuat ini harus berkoordinasi secara langsung dengan kepala daerah. Pihak-pihak yang berperan dalam menguatkan kelembagaan LPK ini adalah Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Walikota, serta lembaga-lembaga donor.

2) Kebijakan dan penganggaran program

Penanggulangan kemiskinan untuk memecahkan masalah pada aspek kebijakan dan penganggaran program diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut harus secara eksplisit dituangkan dalam kebijakan dan penganggaran program. Misalnya memasukkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) ke dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Hal ini perlu didukung dengan penerapan good governance dan penciptaan lapangan kerja dan usaha, serta adanya akses pelayanan publik. Hal ini bisa dilakukan dengan merumuskan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memihak kepada rakyat miskin. Selain itu, diperlukan Perda yang secara nyata mengalokasikan anggaran APBD untuk program penanggulangan kemiskinan. Hal ini juga harus didukung perda tentang investasi yang berpihak kepada rakyat miskin (*pro-poor investment*) dan adanya perda yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara kabupaten/kota dan

desa. Pemda paling tidak harus memiliki Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakatnya dalam penyediaan fasilitas dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, maka masyarakat harus diberi akses yang memadai pada modal dan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas diperlukan sinergi antara eksekutif maupun legislatif, BUMN/BUMD, sektor swasta, dan dinas terkait di daerah. Peranan Bappenas dan Departemen Keuangan, serta pihak perbankan di tingkat pusat juga sangat menentukan, selain keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penanggulangan kemiskinan.

3) Sumber daya manusia

Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yang ditemui selama ini tentunya perlu dilakukan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, termasuk peningkatan mutu masyarakat miskin itu sendiri. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peranan yang penting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia ini. Hal ini bisa pula dilakukan dengan dukungan dari lembaga-lembaga donor maupun lembaga swadaya masyarakat yang bisa memberikan bantuan teknis (technical assistance) maupun pemberian dana hibah (grant). Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia perlu dilakukan peningkatan knowledge, attitude, and skill baik bagi forum multipihak maupun masyarakat.

4) Data dan informasi mengenai kemiskinan

Permasalahan di bidang data dan informasi dapat diatasi dengan penyamaan persepsi, baik mengenai definisi/pengertian, indikator maupun profil kemiskinan. Kesamaan persepsi mengenai kemiskinan ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis kemiskinan partisipatif, menggunakan Susenas sebagai data pembanding terhadap data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan bisa juga dilakukan dengan survei atau pendataan secara langsung terhadap masyarakat miskin. Peranan LPK dan BPS dalam hal ini sangat menentukan dalam penyediaan data dan informasi yang akan digunakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.

5) Monitoring dan Evaluasi

Dalam pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan tidak hanya diperlukan monev yang sifatnya internal program atau proyek, tetapi juga perlu monev eksternal dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya standar kinerja atau indikator yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan monev. Selain itu, sistem dan mekanisme monev harus partisipatif, dan diperlukan kaji ulang (review) terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah. Suatu program atau proyek juga harus ada mekanisme penyelesaian konflik (conflict resolution) apabila dalam pelaksanaannya ditemui suatu permasalahan.

Untuk itu, dapat dilakukan monev secara internal, eksternal, maupun independen. Selain itu bisa juga dilakukan kajian-kajian terhadap kebijakan dan program. Sebagai hasil dari suatu monev diperlukan adanya penghargaan (reward) atau sanksi (punishment). Untuk menjalankan fungsi monev ini, peranan berbagai lembaga sangat penting. Lembaga-lembaga tersebut adalah LPK, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), perguruan tinggi, kelompok pemantau independen, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), masyarakat pada umumnya, dan lembaga-lembaga donor.

Simpulan

Strategi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya tidak hanya sebatas pada perumusan strategi. Akan tetapi, bagaimana kemampuan mengidentifikasi mulai dari karakteristik, kebutuhan dan permasalahan di tingkat komunitas (Masyarakat, Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan) secara komprehensif. Selanjutnya, optimalisasi rumusan masalah mendasar di tingkat kota/kabupaten hingga provinsi, sehingga secara integral dapat menganalisis dan menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Kesemuanya perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak kepada pola pemberdayaan masyarakat dan fokus serta kepedulian seluruh stakeholder dalam hal ini pemerintah, dunia usaha dan Industri (melalui Corporate Social Responsibility), Lembaga Swadaya masyarakat, tokoh masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) dan perguruan tinggi.

Referensi

- Sopandi, A. (2012). Sinergitas dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 2(2), 41-50.
- BPS Kabupaten Wonosobo. (2021). Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam Era New normal
- BPS Kabupaten Wonosobo. (2021). Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Dokumen RPJMN Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026
- Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
- Kaukab, M. E. (2022). Memetakan Pola Penguatan Ekonomi untuk Masyarakat dalam Kemiskinan Ekstrem Pasca Pandemi di Kabupaten Wonosobo. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1-9.
- <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>
- <https://diskominfo.wonosobokab.go.id/detail/untuk-menumbuhkan-daya-saing-daerah-rkpd-2023-fokus-tingkatkan-kualitas-sdm-infrastruktur-dan-ekonomi>
- <https://website.wonosobokab.go.id/category/detail/RKPD-2023>
- <https://wonosobokab.bps.go.id/indicator/23/108/2/angka-kemiskinan.html>
- <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>
- <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/2024-wonosobo-targetkan-bebas-kemiskinan-ekstrem/>